

**ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SELAMA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Fran Marinka Widiyanto

NIM : 992114207

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

**ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SELAMA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Fran Marinka Widianto

NIM : 992114207

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI

**ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SELAMA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Oleh :

Fran Marinka Widiyanto

NIM : 992114207

Telah disetujui Oleh

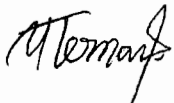
Pembimbing I



(Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.)

Tanggal: 24 Agustus 2006

Pembimbing II



(M.T. Ernawati, S.E., M.A.)

Tanggal: 02 Oktober 2006

SKRIPSI

**ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SELAMA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Fran Marinka Widianto

NIM : 992114207

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 20 November 2006

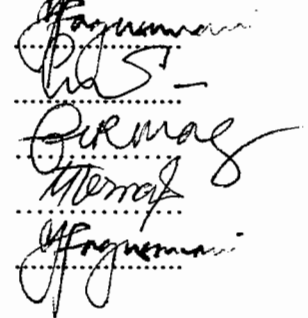
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	M.T. Ernawati, S.E., M.A.
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 November 2006
Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dekan,

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan kepada yang tersayang,

Bapak dan Ibuku, Kakaku mbak Siska dan mas Thomas, serta

keponakanku Marcel

Juga buat eyangku tercinta

MOTTO

Bebaskanlah pikiran Anda, seperti awan putih yang bergerak di langit. Kerjakanlah yang terbaik, tapi biarkanlah hasilnya mengurus dirinya sendiri. Awan tidak mencemaskan apakah angin berhembus ke utara, selatan, timur, ataupun barat. Mengapa menyia-nyiakan waktu dengan mencemaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. (Walters)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18 oktober 2006

Penulis,



Fran Marinka Widiyanto

ABSTRAK

ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SELAMA OTONOMI DAERAH

**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

**FRAN MARINKA WIDIANTO
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui apakah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (2) Mengetahui perkembangan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dari tahun 2001-2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung (1) proporsi PAD terhadap APBD (2) menghitung perkembangan proporsi PAD terhadap APBD.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) selama empat tahun terakhir (2001-2004) persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD yaitu sebesar 16,55% sampai dengan 21,57%, yang memiliki proporsi sebesar $< 25\%$, maka PAD Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (2) hasil perhitungan t- hitung sebesar 2,88 menunjukkan H_0 diterima yang berarti tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD yang signifikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE PROPORTION OF LOCAL ORIGINAL REVENUE TOWARD THE REGIONAL BUDGET DURING REGIONAL AUTONOMY

A CASE STUDY ON YOGYAKARTA MUNICIPALITY GOVERNMENT

**FRAN MARINKA WIDIANTO
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2006**

This reseach was aimed : (1) to know whether the Local Original Revenue (PAD) of Yogyakarta Municipality Government supported the implementation of regional autonomy, (2) to know the development of the proportion of PAD toward the regional budget (RB) of Yogyakarta Municipality Government from 2005-2008. This reseach was a case study on the Government of Yogyakarta Municipality Government. The techniques used in collecting data were interview and documentation. Technique used in analyzing the data was quantitative data analysis. It was used to count (1) The proportion of PAD toward RB, (2) The development of proportion of PAD toward RB.

Based on the data analysis, it could be concluded that. (1) in last four years (2001-2004), the percentages of realization proportion of PAD toward RB realization were only 16.55% to 21.57%. these percentages were under the minimum standard that was expected to support the regional autonomy implementation. (2) the result of t-test was 2,88. it showed that Ho was accepted, thus it meant that there was no significant increase of percentage of realization proportion of PAD toward RB realization in Yogyakarta Municipality Government from 2001-2004.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah Tri Tunggal Maha Kudus atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan karya tulis yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari betul bahwa tulisan ini memiliki banyak kekurangan dan pada kesempatan ini tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak baik secara langsung maupun tak langsung yang telah banyak membantu penulis. Untuk itu terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bunda Maria dan Putera-Nya Yesus Kristus yang selalu menolong dan melindungiku di sepanjang hidupku.
2. Dr Ir. P. Wiryono P., S.J selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
3. Drs. Alex Kahu Lantum. MS selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
4. Ir. Drs. Hansiadi YH. M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma
5. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan pengorbanan untuk membimbing penulis dari awal penulisan hingga selesai

6. M.T. Ernawati, S.E., M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, ketelitian, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
7. Dra. YFM. Gien. Agustinawansari, MM selaku pembimbing akademik angkatan 99 "C", terimakasih atas teguran dan nasehatnya
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak membantu, membimbing dalam proses belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
9. Segenap staf karyawan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
10. Buat Bapak dan Ibu tersayang, terimakasih doa dan kasih sayang yang selama ini saya dapatkan
11. Buat kakakku yang tersayang siska dan buat masku Thomas
12. Buat Saudaraku semuanya di Yogyakarta (Eyang Darmo, Eyang Suhar, Pakde Kumarhadi, om Kokok, Tante Tri, serta om, tante yang tidak bisa kusebut satu-persatu.
13. Buat Theresia Ratnawati terimakasih atas doa, dukungan, dan dukungannya selama ini.
14. Mas Joko terimakasih atas waktu, saran dan masukan. Kapan saja saya membutuhkan, mas selalu membantu
15. Buat Binsar dan Rosa terima kasih banyak atas persahabatan dan dukungan dari kalian berdua.

16. Sahabat-sahabat **Akuntansi C "99"** (Legiman, Bayu, Benny, Lina, Banar, Dedi, Adi, Agus, Penny, Dewi, Tias, kriswanto, Jefri, Anggita, Erna, Okta) dan John, Pia, Sukma, cahyo juga buat Novi dan Herlina.
17. Buat semua temen Kost "Lampar 20", Papringan. (Mas Heri, bayu, Dian, wawan, Bapak John, Mas Topo, dan Rudy)
18. Rekan-rekan semua pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi

Kepada mereka semua, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih, selain itu penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan karena keterbatasan penulisan.

Akhirnya semoga apa yang penulis sampaikan lewat skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Oktober 2006

Penulis



Fran Marinka Widiyanto



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Pembahasan.....	4

BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pendapatan Daerah.....	7
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
C. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	17
D. Otonomi Daerah.....	19
E. Review Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	32
A. Geografi.....	32
B. Pemerintahan.....	33
C. Kependudukan.....	35
D. Sosial	37
E. Pertanian.....	40
F. Industri, Listrik, dan Air Minum.....	42
G. Perekonomian.....	44
H. Perhubungan.....	46
I. Keuangan dan Harga-Harga.....	48
J. Pendapatan Regional.....	49
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Data.....	51
B. Analisis Data	55

C. Pembahasan.....	63
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran	73

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel	
1. 1 Tabel Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	12
4. 1 Tabel Luas Wilayah, Jumlah RW dan Rt menurut Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Yogyakarta.....	34
4. 2 Tabel Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS.....	36
4. 3 Tabel Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS	36
4. 4 Tabel Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Yogyakarta tahun 2004	37
5. 1 Tabel Anggaran dan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2005.....	51
5. 2 Tabel APBD dan Realisasi APBD	52
5. 3 Tabel Realisasi APBD (Sistem Baru) tahun 2003	53
5. 4 Tabel Realisasi (APBD Sistem Baru) Tahun 2004	54
5. 5 Tabel Perbandingan Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD	56
Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008	58
5. 6 Tabel Analisis Trend Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD.....	61
5. 7 Tabel Perhitungan t-hitung.....	61

5.8	Tabel Perbandingan Realisasi PAD dengan Realisasi APBD	
	Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2004.....	63
5.9	Tabel Perkiraan Prosentase Proporsi	
	Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD Tahun 2005	
	Sampai Dengan Tahun 2008	66

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
3. 1 Diagram Pengujian Hipotesa.....	30
5.1 Diagram Hasil Pengujian Hipotesa	67

Daftar Lampiran

Lampiran.....	73
Lampiran Satu.....	74
Lampiran Perhitungan Regresi dan Uji-t.....	75
Lampiran Dua.....	76
Lampiran Tabel Distribusi t.....	77
Lampiran Tiga.....	78
Lampiran Data-Data APBD Tahun 2001-2004.....	79
Lampiran Empat.....	91
Lampiran Surat Keterangan Ijin.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem tersebut diperlukan sebagai alat untuk melaksanakan program pemerintah tetapi yang lebih penting supaya masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan pembangunan daerahnya sendiri. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu untuk diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerah yang ada sehingga pemerintah daerah dan masyarakatnya diharapkan dapat memiliki peran utama dalam memajukan daerahnya masing-masing.

Kemajuan suatu daerah merupakan salah satu keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu faktor yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah adalah tingginya sumber Pendapatan Daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu ukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan Pendapatannya yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerahnya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menekan proporsi peranan dari Pemerintah Pusat.

Tinggi rendahnya sumber Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan, seperti kondisi

daerah, geografis, potensi sumber daya alam (SDA), potensi sumber daya Manusia (SDM), dan kewenangan yang diberikan. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah pada umumnya masih rendah, sehingga kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijumpai pada tahun 1999 / 2000 hanya lima propinsi yang mampu mencapai PAD di atas 50% terhadap APBD, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali (Saragih, 2003: 57).

Berdasarkan hal diatas maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dari hal tersebut diharapkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga daerah dapat memajukan daerahnya sendiri dan keberhasilan otonomi dapat berjalan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta mendukung pelaksanaan otonomi daerah ?
2. Bagaimana perkembangan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini meneliti pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah yang difokuskan pada kemampuan keuangan daerah dengan melihat proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Yogyakarta (tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) dengan menggunakan proporsi kemandirian sebesar $> 25\%$ sebagai ukuran yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004: 188-189).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui perkembangan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemerintah daerah Kota Yogyakarta untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma dan bahan pertimbangan dan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat memperluas wawasan dan dapat mengembangkan pengetahuan serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu juga dibahas tentang kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari latar belakang tersebut, dilanjutkan dengan merumuskan masalah tentang Pendapatan Asli Daerah sebagai ukuran kemampuan mendukung otonomi daerah, dan perkembangan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD di Kota Yogyakarta

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini dibahas tentang dasar-dasar teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan berupa uraian tentang Pendapatan Daerah dan sumber-sumbernya serta dasar hukumnya. Selain itu juga dibahas dana perimbangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah dan uraian tentang otonomi daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian berupa studi kasus yang dilakukan di tempat penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu obyek penelitian yang berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kemudian teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

BAB IV : Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Pembahasan yang dilakukan meliputi sejarah perkembangan Kota Yogyakarta , kapan terbentuk, batas wilayah, luas wilayah dan sekilas tentang perkembangannya sampai pada saat ini.

BAB V : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai perhitungan Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)). Kemudian dilakukan perhitungan dan analisa tingkat perkembangan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil perhitungan dan analisis penelitian yang selesai dibuat. Disini juga dijelaskan tentang keterbatasan yang didapat selama melakukan penelitian. Kemudian dari kesimpulan yang ada dapat diberikan saran-saran kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta agar dapat mengantisipasi masalah-masalah yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang no 33 tahun 2004 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak daerah

Yang dimaksud pajak daerah adalah pembayaran iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2003: 98-99)

Jenis-jenis pajak daerah antara lain (Mardiasmo, 2003: 100) :

- 1) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen)

- 3) Pajak hiburan sebesar 35%(tiga puluh lima persen)
- 4) Pajak reklame sebesar 25%(dua puluh lima persen)
- 5) Pajak penghasilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- 6) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

b. Retribusi daerah

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003: 100-101).

Jenis-jenis retribusi antara lain (Mardiasmo, 2003: 101-103) :

- 1) Retribusi jasa umum antara lain (Mardiasmo, 2003: 102) :
 - a). Retribusi pelayanan kesehatan
 - b). Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
 - c). Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - d). Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f). Retribusi pelayanan pasar
 - g). Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h). Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i). Retribusi penggantian biaya cetak peta

- j). Retribusi pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi jasa usaha antara lain (Mardiasmo, 2003: 102)
- a). Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b). Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
 - c). Retribusi tempat pelelangan
 - d). Retribusi terminal
 - e). Retribusi tempat khusus parkir
 - f). Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g). Retribusi penyedotan kakus
 - h). Retribusi rumah potong hewan
 - i). Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j). Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k). Retribusi penyebrangan di atas air
 - l). Retribusi pengolahan limbah cair
 - m). Retribusi penjualan produksi daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu antara lain (Mardiasmo, 2003: 102-103) :
- a). Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b). Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
 - c). Retribusi izin gangguan
 - d). Retribusi izin trayek

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Tujuan dari dana perimbangan adalah membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana bagi hasil terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) dan sumber daya alam.
- b. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh dana alokasi umum relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar.
- c. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Tabel 2. 1
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

No	Jenis pendapatan	Pusat (%)	Daerah (%)
1	Pajak bumi dan bangunan	10	90
2	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	20	80
3	Penerimaan kehutanan		
	> Iuran hak pengusahaan hutan	20	80
	> Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi	60	40
5	Penerimaan pertambangan umum	20	80
6	Penerimaan pertambangan minyak bumi	84.5	15.5
7	Penerimaan pertambangan gas bumi	69.5	30.5
8	Pertambangan panas bumi	20	80
9	Penerimaan perikanan	20	80

Sumber undang-undang no 33 tahun 2004

3. Lain-lain penerimaan yang sah

B. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah

tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam satu tahun anggaran APBD meliputi :

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

2. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sistem lama dan sistem baru dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2
Pelaporan APBD Sistem Lama dan Sistem Baru

No	Sistem Lama	Sistem Baru
1	Sistem pencatatan <i>Single Entry</i> (pembukuan tunggal / tidak berpasangan).	Sistem pencatatan <i>double entry</i> , untuk dapat menyusun neraca diperlukan adanya sistem pencatatan yang akurat (<i>appropriate recording</i>).
2	<i>Dua Budget</i> (rutin dan pembangunan).	<i>Unified budget</i> (anggaran terpadu), tidak mengenal lagi rutin dan pembangunan.
3	<i>Incremental Budget</i> , didasarkan pada jenis belanja dan lebih <i>input oriented</i> .	<i>Performance budget</i> (berbasis kinerja), dan lebih <i>output oriented</i> .
4	Laporan yang dihasilkan berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan	Laporan yang dihasilkan berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, neraca daerah dan laporan arus kas
5	Pengakuan belanja dan pendapatan berdasarkan basis kas, artinya belanja dan pendapatan daerah diakui pada saat kas dikeluarkan dari / diterima di kas	Pengakuan belanja dan pendapatan daerah pada dasarnya sama yaitu kas basis, tetapi untuk kepentingan penyusunan neraca digunakan <i>modified accrual basis</i> . artinya

Tabel 2. 2 (lanjutan)

No	Sistem Lama	Sistem Baru
	daerah. Pengeluaran belanja modal hanya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, tidak dicatat sebagai aset tetap.	belanja modal atau investasi dicatat sebagai aset di neraca daerah melalui jurnal : Debet : aset tetap Kredit : ekuitas dana
6	Anggaran berimbang dan dinamis, dengan struktur anggaran pendapatan daerah sama dengan belanja daerah, tidak mengenal defisit atau surplus anggaran. Pinjaman yang diperoleh daerah dicatat sebagai penerimaan daerah, yang seharusnya merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.	Surplus / (defisit) anggaran, dengan struktur anggaran : Pendapatan daerah : xxx Belanja daerah : xxx Surplus / (defisit) : (xxx) Pembiayaan : xxx Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran, seperti sumber dana dari pinjaman dan penjualan aset daerah / kekayaan daerah yang dipisahkan
7	Kebijakan akuntansi belum ada	Kebijakan akuntansi
8	Deskripsi pendapatan dan belanja sudah ada, tetapi deskripsi neraca belum ada	Deskripsi pendapatan, belanja dan neraca
9	Jenis laporan yang disusun hanya laporan APBD	Jenis laporan yang disusun adalah : - laporan APBD - nota perhitungan APBD - aliran kas - neraca
10	Bentuk dan format penyajian laporannya sebagai berikut • laporan APBD • laporan perubahan APBD • laporan triwulanan • laporan perhitungan APBD	Bentuk dan format penyajian laporannya sebagai berikut : - laporan APBD - laporan perubahan APBD - laporan triwulanan APBD - nota perhitungan APBD - laporan aliran kas - neraca
11	Bentuk dan susunan kode rekening untuk pendapatan, dan belanja dan neraca belum ada Prosedur-prosedur akuntansi (<i>flowchart</i>) belum dibuat. Tata pembukuan lebih menekankan pada pengisian dokumen, buku, dan catatan	Bentuk dan susunan kode rekening untuk pendapatan, belanja, dan neraca Prosedur-prosedur akuntansi yang dibuat (<i>flowchart</i>) : a. Pendapatan • Pajak daerah • Retribusi daerah • Dana perimbangan • Penerimaan lain-lain (sumbangan pihak ketiga)

Tabel 2. 2 (lanjutan)

No	Sistem Lama	Sistem Baru
		<ul style="list-style-type: none"> • Rumah sakit swadana dan nonswadana • Penyetoran sisa UUDP • Belanja <ul style="list-style-type: none"> • Belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik (beban sementara dan beban tetap) • Belanja transfer • Belanja tidak tersangka
12	Formulir, dokumen, buku besar dan buku pembantu masih terjadi tumpang tindih dalam penggunaannya.	Formulir, dokumen, buku besar, dan buku pembantu untuk prosedur diatas

Sumber : Yuwono, 2005: 72 – 75

3. Penyusunan Anggaran daerah adalah :

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.
- b. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.

- c. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
 - d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rancangan kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
 - e. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas pembicaraan pendahuluan RAPD.
 - f. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
 - g. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober.
 - h. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan pada satu tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Fungsi anggaran sektor publik adalah :
- a. Sebagai alat perencanaan

- b. Sebagai alat pengendalian
 - c. Sebagai alat kebijakan fiskal
 - d. Sebagai alat politik
 - e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
 - f. Sebagai alat penilaian kinerja
 - g. Sebagai alat motivasi.
5. Pemakai laporan keuangan daerah adalah :
- a. DPRD
 - b. Badan Eksekutif
 - c. Badan pengawas keuangan
 - d. Investor, kreditor, dan donator
 - e. Analis Ekonomi dan pemerhati daerah
 - f. Rakyat
 - g. pemerintah pusat.

C. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah (Halim, 2004: 188-189) :

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi

daerah, terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain :

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam berikut ini :

Tabel 2. 3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75%- 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2004: 189

D. Otonomi Daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat (5) Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (6) Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

2. Tujuan dan sasaran otonomi daerah

Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya Pemerintah Daerah.

3. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi yang dianut oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang otonomi daerah. Keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, ditambah agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Prinsip dasar pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, serta keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas diserahkan pada daerah kabupaten dan kota.

- d. Otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Tolok Ukur Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6 tentang keuangan negara yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004: 22).

5. Indikator keberhasilan otonomi daerah

Indikator keberhasilan otonomi daerah antara lain (Yuwono, 2005: 51) :

- a. Memiliki efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan.
- h. Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah

D. Review penelitian

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah di antaranya pernah dilakukan oleh Fransiskus H Parera pada tahun 2004, dan Astherina Vendayanti pada tahun 2004.

Parera (2004) Melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Otonomi daerah di Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian adalah menghitung perkembangan pendapatan pajak daerah, yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah sebelum dan selama otonomi daerah, serta menghitung perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak sebelum dan selama otonomi daerah. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan tabel perbandingan pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah, dan menggunakan formula pengujian hipotesa. Variabel yang dipakai adalah pajak daerah dan periode waktu sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah perkembangan pendapatan pajak daerah sebelum otonomi daerah cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah selama otonomi daerah mengalami peningkatan dan t-hitung sebesar -

3,095 lebih kecil dari t-tabel sebesar -2.75 sehingga H_0 ditolak, dan H_1 diterima terbukti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan pajak daerah sebelum dan selama otonomi daerah.

Vendayanti (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung” . Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung besarnya perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah, dan menghitung besarnya efektifitas penerimaan dari retribusi daerah dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003, serta menghitung besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003. Analisis data yang digunakan adalah dengan formula dan tabel proporsi retribusi, dan menggunakan formula efektifitas, tabel analisis efektifitas retribusi daerah, analisis tend, tabel analisis trend efektifitas retribusi daerah, serta menggunakan formula kontribusi retribusi daerah, tabel kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Variabel yang dipakai adalah besar retribusi dengan total retribusi, realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah, dan realisasi retribusi daerah dengan PAD. Hasil dari penelitian tersebut adalah selama lima tahun anggaran perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah terkadang mengalami kenaikan terkadang mengalami penurunan dan penerimaan retribusi daerah selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 berkisar antara 86,02% sampai 111,89% dengan rata-rata efektifitas mencapai

101,31%, dengan demikian penerimaan retribusi sudah efektif karena rata-rata efektifitasnya melebihi 100%, serta kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 berkisar antara 58,18% sampai dengan 69,47% dengan rata-rata mencapai 63,50%.

Faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan waktu penelitian, analisis data, serta acuan undang-undang yang sudah diperbaharui dari undang-undang no 22 tahun 1999 menjadi Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dengan menggunakan analisis data yaitu dengan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan analisis trend. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap obyek dan data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang bersangkutan dan dalam waktu tertentu.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Waktu penelitian pada bulan Juni 2006 sampai dengan Agustus 2006

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

b. Objek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Data yang diperlukan

- a. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
- b. Data Pendapatan Asli Daerah dan data APBD Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004
- c. Data dan informasi yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan angka-angka yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian

Untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah Kota mendukung pelaksanaan otonomi daerah, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu :

- a. Mencari data yang diperlukan yaitu data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
- b. Melakukan perbandingan realisasi PAD dengan realisasi APBD Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan 2004, untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Menentukan kesimpulan berdasarkan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dengan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) $> 25\%$, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta sudah mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi apabila persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta terhadap realisasi APBD $< 25\%$, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk menjawab masalah kedua mengenai perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta yaitu dengan menggunakan analisis trend sebagai berikut :

$$Y' = a + bx$$

Dimana

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

keterangan

Y' = nilai perkiraan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD

a = nilai Y apabila x sama dengan 0

b = Perubahan nilai Y dari waktu ke waktu

x = periode waktu dan tahun dasar ($x = 0$)

n = Jumlah data

Setelah diketahui persamaan $Y' = a + bx$ maka dapat diketahui perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD pada tahun-tahun yang akan datang. Apabila trendnya naik (dilihat dari lereng garis trend yang positif) berarti perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi apabila trendnya

turun berarti perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi APBD semakin menurun pada tahun-tahun yang akan datang.. Jika perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tetap, berarti perkembangan persentase proporsi PAD terhadap APBD tetap dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui apakah nilai b signifikan atau tidak, dilakukan uji t dengan langkah-langkah :

1) Menentukan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut

H_0 : tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004

H_a : ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004

2) Menentukan taraf nyata (*significant level*) sebesar 5 %

3) Menghitung t -hitung dengan rumus (Algifari, 2003: 177)

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan

b : perubahan nilai Y dari waktu ke waktu

S_b : kesalahan standar koefisien regresi b

Rumus perhitungan kesalahan standar estimasi (*standard error of estimate*) (Algifari, 2003: 175)

$$Se = \sqrt{\frac{\sum(Y - Y')^2}{(n - 2)}}$$

Rumus perhitungan kesalahan standar koefisien regresi b (S_b) (Algifari, 2003: 177)

$$S_b = \frac{Se}{\sqrt{\sum(X^2) - \frac{(\sum X)^2}{n}}}$$

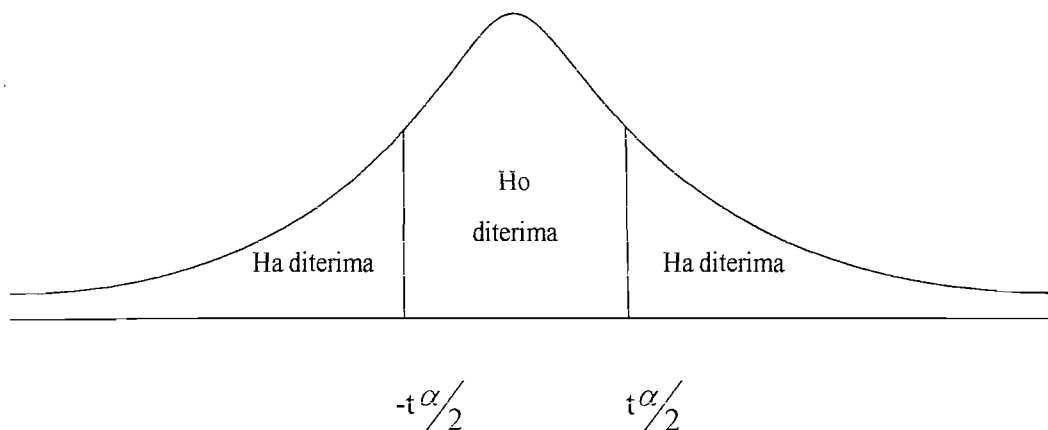
4) Menentukan kriteria pengujian :

Ho diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

Ha diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$

5) Menentukan daerah penerimaan Ho dan penerimaan Ha

Kurva 3. 1



6) Mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian, yaitu jika Ho diterima, berarti tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli daerah terhadap realisasi APBD yang

signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

Jika H_0 diterima, artinya ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi APBD yang signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan 2005.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Geografi

1. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}49'26''$ - $07^{\circ}15'24''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak didaerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 – 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa).

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu : Sungai GajahWong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat kota. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman
2. Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2004 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 271 mm dan terendah terjadi pada bulan Agustus (0 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 6,66 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 93 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 72 persen. Tekanan udara rata-rata 1.011,0 mb dan suhu udara rata-rata 26,9°C

B. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa Bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

2. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 Km². Penggunaan lahan paling

banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.095,609 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 19,577 hektar.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1. Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0,90	18	86
	2. Suryodiningratan	0,85	17	69
	3. Mantrijeron	0,86	20	76
Jumlah	3	2,61	55	231
2. Kraton	1. Patehan	0,40	10	43
	2. Panembahan	0,66	18	78
	3. Kadipaten	0,34	15	53
Jumlah	3	1,40	43	174
3. Mergangsan	1. Brontokusuman	0,93	23	83
	2. Keparakan	0,53	13	58
	3. Wirogunan	0,85	24	76
Jumlah	3	2,31	60	217
4. Umbulharjo	1. Giwangan	1,26	13	41
	2. Sorosutan	1,68	15	59
	3. Pandean	1,38	11	45
	4. Warungboto	0,83	9	38
	5. Tahunan	0,78	11	48
	6. Muja – muju	1,53	12	54
	7. Semaki	0,66	10	34
Jumlah	7	8,12	81	319
5. Kotagede	1. Prenggan	0,99	11	55
	2. Purbayan	0,83	14	58
	3. Rejowinangun	1,25	13	45
Jumlah	3	3,07	38	158
6. Gondokusuman	1. Baciro	1,06	21	89
	2. Demangan	0,74	12	44
	3. Klitren	0,68	16	63
	4. Kotabaru	0,71	4	21
	5. Terban	0,80	12	59
Jumlah	5	3,99	65	276
7. Danurejan	1. Suryatman	0,28	15	45
	2. Tegalpanggung	0,35	16	66
	3. Bausasran	0,47	12	49
Jumlah	3	1,10	43	160
8. Pakualaman	1. Purwokinanti	0,30	10	47
	2. Gunungketur	0,33	9	36
Jumlah	2	0,63	19	83
9. Gondomanan	1. Prawirodirjan	0,67	18	61
	2. Ngupasan	0,45	13	49
Jumlah	2	1,12	31	110
10. Ngampilan	1. Notoprajan	0,37	8	50
	2. Ngampilan	0,45	13	70

Tabel 4. 1 (lanjutan)

Jumlah	2	0,82	21	120
Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
11. Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
	2. Wirobrajan	0,67	12	58
Jumlah	2	1,76	34	165
12. Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,46	23	90
	2. Sosromenduran	0,50	14	56
Jumlah	2	0,96	37	146
13. Jetis	1. Bumijo	0,58	13	56
	2. Gowongan	0,46	13	52
	3. Cokrodiningratan	0,66	11	60
Jumlah	3	1,70	37	168
14. Tegalrejo	1. Tegalrejo	0,82	12	46
	2. Bener	0,57	7	24
	3. Kricak	0,82	13	59
	4. Karangwaru	0,70	14	56
Jumlah	4	2,91	46	185
Jumlah/Total	44	32,50	610	2.512

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta

C. Kependudukan

1. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 persen.

Tabel 4. 2
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta
Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun Year	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa / Km ²)	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	340.908	0.498	0,90
1980	398.192	12.252	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.994	12.891	0.33
2000	397.398	12.228	-0.37

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2004 tercatat 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 47,87 persen laki-laki dan 52,13 persen perempuan.

Tabel 4. 3
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta
Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	169.491	171.417	99,88
1980	199.755	198.437	100,66
1990	202.002	210.057	96,17
1995	211.968	206.967	102,41
2000	194.530	202.868	95,89

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta

2. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen, dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18,964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan 8.057 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.

Tabel 4. 4
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Yogyakarta tahun 2004

Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak tamat SD			
2. SD / Sederajat	7	17	24
3. SMP / Sederajat	131	99	230
4. SMU / Sederajat	4.319	748	5.067
5. D - 1 / D - 2	46	101	147
6. D - 3 / Diploma - 3	694	1.028	1.722
7. S1 / Sederajat	5.633	5.999	11.632
8. S2 / Sederajat	177	65	142
Jumlah / Total	10.907	8.057	18.964
2003	8.993	6.009	15.002

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

3. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 52 kepala keluarga yang terdiri dari 174 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari kecamatan Kotagede dan Tegalrejo, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Timur.

D. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan

sarana fisik pendidikan maupun tenaga kerja pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2004 / 2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 10 institut / sekolah tinggi dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 4.980 orang yang terdiri dari 4.636 orang dosen yayasan dan 344 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 76.071 orang.

2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2004 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 786 orang pada tahun 2003 menjadi 1.004 orang pada tahun 2004. Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-masing adalah 112 dan 24.

Untuk menekan pertumbuhan penduduk , pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2004 jumlah akseptor tercatat 35.638 orang atau 76,35 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (35,99 persen).

3. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2004 sebanyak 329.386 orang atau 82,76 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,18 persen Katholik, 6,31 persen Kristen, 0,22 persen Hindu, dan 0,43 persen Budha.

4. Peradilan

Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan. Pada tahun 2004 perkara pelanggaran yang masuk ke pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 14,205 perkara atau naik 51,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya jumlah tahanan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan penghuni lembaga pemasyarakatan juga mengalami penurunan. Jumlah tahanan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menurun dari 454 pada tahun 2003 menjadi 386 pada tahun 2004. Penghuni lembaga pemasyarakatan berkurang dari 616 orang menjadi 366 orang.

5. Sosial lainnya

Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2004 sebanyak 618 anak yang terdiri dari 382 anak laki-laki dan 236 anak perempuan. Jumlah penderita cacat tercatat 2.502 orang. Pada tahun 2003 orang terlantar berjumlah 327 orang pada tahun 2004 meningkat menjadi 392 orang.

E. Pertanian

1. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya, tegal / kebun, lading / huma, padang rumput, tambak, kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta.

Pada tahun 2004 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 123 hektar lahan sawah dan 3.127 hektar lahan bukan sawah

2. Tanaman pangan

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2004 mencapai 146 hektar dengan produksi 838 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi pada sawah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan luas panen.

Produksi palawija yang terdiri dari jagung dan kacang tanah pada tahun 2004 masing-masing 98,00 ton dan 30,02 ton, dengan luas panen 25 hektar untuk tanaman jagung dan 32 hektar untuk tanaman kacang tanah. Dibandingkan dengan tahun 2003, produksi jagung meningkat 60,18 persen, sedangkan produksi kacang tanah turun 11,311 persen. Kenaikan produksi jagung disebabkan adanya kenaikan luas panen dan

produktifitasnya sedangkan penurunan produksi kacang tanah disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktifitas.

Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah papaya. Pada tahun 2004 populasi pohon papaya sebanyak 19,8 ribu pohon dengan produksi 464,2 ton.

3. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2004 populasi tanaman kelapa sebanyak 7.657 pohon dan 6.961 pohon di antaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 87,72 ton.

4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2004 mencatat 999 kuintal yang terdiri dari 128 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 188 kuintal perikanan sawah, 656 kuintal perikanan kolam dan 27 kuintal produksi ikan dan karamba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi ikan di dalam keramba, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.

Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 produksi benih ikan tercatat 907 ribu ekor dan pada tahun 2004 menjadi 981 ribu ekor atau naik sebesar 8,15 persen. Peningkatan ini terjadi pada benih ikan gurameh yang diproduksi oleh Usaha Pembenihan Rakyat.

5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2004 secara berturut-turut adalah 13 ekor, 219 ekor, 46 ekor, dan 32 ekor.

Sementara itu populasi kambing, domba, babi, dan kelinci yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 211 ekor, 597 ekor, 235 ekor, dan 96 ekor. Populasi ternak kecil paling banyak terdapat di Kecamatan Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, dan itik berturut-turut adalah 3.000 ekor, 4.500 ekor, 0 ekor, 73.602 ekor dan 1.070 ekor.

Jumlah pemotongan ternak pada tahun 2003 tercatat 10.902 ekor sapi, 3.881 ekor kambing, 7.122 ekor domba, dan 4.263 ekor babi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah ternak yang paling banyak dipotong adalah ternak sapi. Produksi telur tercatat 1.445,8 ribu butir, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 3.845,8 ribu butir.

F. Industri, Listrik, dan Air Minum

1. Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga.

Industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih dan industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebanyak 110 perusahaan dengan 8.562

tenaga kerja. Dibandingkan dengan tahun 2003 perusahaan industri besar dan sedang mengalami penurunan sebesar 1,78 persen.

Informasi mengenai industri kecil diperoleh dari Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta. Pada tahun 2004 jumlah industri kecil tercatat 5.814 unit dengan jumlah tenaga kerja 30.143 orang dan nilai investasi sebesar Rp 148.487 juta. Dibandingkan dengan tahun 2003 jumlah usahanya mengalami kenaikan 0,50 persen. Jumlah tenaga kerja yang terserap naik 0,88 persen dan nilai investasinya meningkat 1,57 persen. Industri kecil yang paling banyak adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

2. Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 94.210 pelanggan. Berdasar data dari PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Yogyakarta, jumlah pelanggan tercatat 148.336. Namun jumlah tersebut termasuk pelanggan dari kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Mayoritas pelanggan adalah rumahtangga yaitu sebesar 88,73 persen, dengan jumlah pemakaian 250.258.526 KWh atau 47,67 persen dari total pemakaian.

3. Air Minum

Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta, produksi air minum pada tahun 2004 mencapai 17.535.644 m² atau naik 1,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume air yang disalurkan hanya 10.973.780 m² atau 62,58 persen dari total produksi. Jumlah pelanggan pada tahun 2004 tercatat

34.627 pelanggan dan sebagian besar adalah kelompok pelanggan non niaga yang terdiri dari rumahtangga dan instansi pemerintah. Kelompok pelanggan non niaga berjumlah 32.387 pelanggan atau 93,53 persen dari total pelanggan, dengan rincian 31.299 pelanggan rumahtangga dan 1.088 instansi pemerintah.

G. Perekonomian

1. Ekspor

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2004 meningkat dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 39.418.773 US \$ di tahun 2003 menjadi 41.605.120 US \$ di tahun 2004. Sebagian besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa. Komoditas mebel kayu pada tahun 2004 memiliki kontribusi terbesar dengan nilai total ekspor mencapai 19.916.415 US \$ atau 47,87 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh komoditas kulit lembaran disamak dengan nilai 6.712.159 US \$ atau mencapai 16,13 persen pada tahun 2004, dan komoditas sarung tangan golf menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor mencapai 5.348.083 US \$ atau 12,85 persen pada tahun 2004.

2. Pasar

Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah / daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 31 pasar menempati lahan seluas 108.122 m² dengan 13.242 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 30 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 70 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas.

3. Persediaan pangan

Kebutuhan dasar manusia akan pangan, terutama pada makanan pokok yaitu beras menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah selalu menjaga ketersediaannya. Ketersediaan pangan yang diidentikkan dengan ketersediaan beras selama kurun waktu tahun 2004 dapat dikatakan cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta.

Persediaan beras pada gudang dolog terutama ditujukan untuk menjaga tingkat harga konsumen maupun produsen. Total penyaluran beras pada tahun 2004 mencapai 42.387 ton dan total pengadaan mencapai 44.312 ton. Sedangkan persediaan beras pada akhir bulan Desember tahun 2004 mencapai 15.237 ton. Jumlah penyaluran beras terbesar yang dilakukan oleh Dolog yaitu terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 9.591 ton.

4. Koperasi

Koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi

yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebanyak 450 koperasi dengan 54.019 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah rumahtangga di Kota Yogyakarta mencapai 39 persen, berarti menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung pada koperasi. Pada tahun 2004 volume usaha koperasi mencapai 107.295 juta, naik 33,75 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 5.119 juta rupiah.

H. Perhubungan

1. Transportasi

Tersedianya prasarana / infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 246.724 km dengan rincian 224.254 km jalan yang sudah diaspal dan 0,605 km jalan kerikil. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 3.733 km berada dibawah kewenangan Propinsi D.I. Yogyakarta dan 224.859 km berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan

layak untuk dilalui, 20,60 persen kondisi jalan baik, 45,07 persen kondisi jalan sedang, dan 34,33 persen kondisi jalan rusak.

Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2004, jumlah kendaraan umum bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 8.039 unit. Komposisinya pada tahun 2004 terdiri atas 7,70 persen mobil penumpang umum, 62,22 persen pick up, 9,67 persen truk, 18,37 persen kendaraan bis.

Angkutan kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun yaitu stasiun Tugu yang khusus diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif, dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

2. Pos dan Komunikasi

Jumlah Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Kamar Bicara Umum (KBU) di wilayah Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2004 ada sebanyak 5.935 buah, yang terbagi kedalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis. Di wilayah stasiun telepon otomatis Kotabaru terdapat 3.767 buah, Pugeran 1.639 buah, dan Kentungan 629 buah. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 1.290 sambungan.

Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu 2004 mencapai 9.613 ribu surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota

Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim turun 46,58 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik missal yang sampai saat ini masih banyak digemari masyarakat. Jumlah stasiun radio swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 13 stasiun, bertambah 2 stasiun radio dibandingkan tahun sebelumnya. Stasiun-stasiun tersebut terbesar di wilayah kecamatan Kota Yogyakarta dengan kecamatan Pakualaman yang menjadi wilayah konsentrasi stasiun radio swasta.

I. Keuangan dan Harga-Harga

1. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah , perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakannya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Pada tahun anggaran 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mencapai 79.911 juta rupiah, meningkat 16,45 persen dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.622 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya hanya 21,58 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan daerah

masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Perbankan

Sampai dengan bulan Desember 2004 posisi kredit perbankan di kota Yogyakarta mencapai 1.809.582 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya posisi kredit naik 20,82 persen. Disisi lain jumlah aktiva bank di Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan dari 7.722.047 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 8.76.295 juta rupiah pada tahun 2004.

3. Harga-harga

Harga merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi regional maupun nasional. Tingginya perubahan komoditas suatu daerah secara kontinyu menunjukkan ketidakstabilan ekonomi pada daerah tersebut. Perubahan harga juga berarti perubahan tingkat inflasi.

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 6,95 persen, meningkat dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2003 yang mencapai 5,73 persen. Secara umum tingginya tingkat inflasi terutama disebabkan oleh perubahan harga pada kelompok perumahan, kesehatan dan pendidikan.

J. Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Yogyakarta pada tahun 2004 mencapai 5.394 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 1.667 milyar

rupiah atas dasar harga konstan 1993. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Angkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta sektor Jasa-jasa. Sumbangan sektor tersier tersebut terhadap PDRB lebih dari 75 persen.

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,08 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 4,05 persen. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,98 persen dan 4,81 persen. Kedua sektor tersebut merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kota Yogyakarta.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, apakah mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan perkembangan prosentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apakah cenderung mendukung pelaksanaan otonomi daerah atau cenderung tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimasa yang akan datang, dan melihat perkembangan prosentase proporsi Pendapatan Asli Daerah signifikan atau tidak signifikan. Tentunya data utama yang diperlukan adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 5. 1
Anggaran dan Realisasi PAD
Kota Yogyakarta
Tahun 2001 – 2004

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2001	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43
2002	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89
2003	56.822.010.000	68.621.564.311,07
2004	70.412.081.000	79.911.419.100,82

Sumber : data sekunder

Tabel 5. 2
APBD dan Realisasi APBD (Sistem Lama) Tahun 2001 dan 2002

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)
2001	223.751.188.920,00	223.751.188.920,00	243.769.299.493,98	243.769.299.493,98
2002	287.073.538.000,00	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68	303.020.070.537,68

Sumber : data sekunder

Tabel 5. 3
APBD dan Realisasi APBD (Sistem Baru) Tahun 2003

APBD

Tahun	Anggaran pendapatan (Rp) (1)	Anggaran Belanja (Rp) (2)	Defisit Anggaran (Rp) (3)	Pembiayaan Anggaran (Rp) (4)	Anggaran Pendapatan Setelah Pembiayaan (Rp) (5) (1) +(4)
2003	303.420.033.000,00	347.656.963.383,00	(44.236.930.383,00)	44.236.930.383,00	347.656.963.383,00

Sumber : data sekunder

Realisasi APBD

Tahun	Realisasi Anggaran pendapatan (Rp) (1)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp) (2)	Surplus Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp) (3)	Pembiayaan Realisasi Anggaran (Rp) (4)	Realisasi Anggaran Pendapatan Setelah Pembiayaan Realisasi Anggaran (Rp) (5) (1) -(4)
2003	338.630.761.654,14	305.351.032.427,44	33.279.729.226,70	(33.279.729.226,70)	305.351.032.427,44

Sumber : data sekunder

Tabel 5. 4
APBD dan Realisasi APBD (Sistem Baru) Tahun 2004

APBD

Tahun	Anggaran pendapatan (Rp) (1)	Anggaran Belanja (Rp) (2)	Defisit Anggaran Pendapatan (Rp) (3)	Pembiayaan Anggaran (Rp) (4)	Anggaran Pendapatan Setelah Pembiayaan (Rp) (5) (1) + (4)
2004	341.144.382.000,00	415.207.191.317,00	(74.062.809.317,00)	74.062.809.317,00	415.207.191.317,00

Sumber : data sekunder

Realisasi APBD

Tahun	Realisasi Anggaran pendapatan (Rp) (1)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp) (2)	Defisit Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp) (3)	Pembiayaan Realisasi Anggaran (Rp) (4)	Realisasi Anggaran Pendapatan Setelah Pembiayaan Realisasi Anggaran (Rp) (5) (1) + (4)
2004	369.649.879.034,51	370.340.575.770,04	(690.696.735,53)	690.696.735,53	370.340.575.770,04

Sumber : data sekunder

B. Analisis Data

1. Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah dikatakan mendukung pelaksanaan otonomi daerah apabila proporsinya terhadap APBD sebesar $> 25\%$ (Halim, 2004: 188-189).

Dengan proporsi PAD terhadap APBD sebesar $> 25\%$, dikatakan PAD suatu daerah sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena sudah mampu untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintah daerah secara mandiri dengan mengurangi proporsi ketergantungan kemampuan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Tinggi rendahnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi APBD Kota Yogyakarta sangat menentukan kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. 5
Perbandingan Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD
Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Proporsi PAD Terhadap APBD (%)
2001	40.352.592.890,43	243.769.299.493,98	16,55
2002	56.377.459.398,89	303.020.070.537,68	18,60
2003	68.621.564.311,07	305.351.032.427,44	22,47
2004	79.911.419.100,82	370.340.575.770,04	21,57

- a. Persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2001 sebesar 16,55%.
- b. Persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2002 sebesar 18,60%. Proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD untuk tahun 2002 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar 2,05%.
- c. Persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2003 sebesar 22,47%. Proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar 3,87%.
- d. Persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2004 sebesar 21,57%. Proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD untuk tahun 2004 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 0,9%

2. Perkembangan Persentase Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD

Untuk melihat kemampuan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang apakah cenderung mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimasa yang akan datang yaitu dengan melihat perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD.

Untuk melihat perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD digunakan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

$$x = 0$$

keterangan

Y' = nilai perkiraan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi APBD

a = nilai Y' apabila x sama dengan 0

b = perubahan nilai Y dari waktu ke waktu

x = periode waktu dari tahun dasar

n = Jumlah data

Tabel 5. 8 di bawah ini menunjukkan trend perkembangan persentase proporsi PAD terhadap APBD.

Tabel 5. 6
Analisis Trend Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD

Tahun Anggaran	X	Y (%)	XY (%)	X ²
2001	-3	16,55	- 49,65	9
2002	-1	18,60	-18,60	1
2003	1	22,47	22,47	1
2004	3	21,57	64,71	9
Jumlah	$\sum X = 0$	$\sum Y = 79,19$	$\sum XY = 18,93$	$\sum X^2 = 20$

Dari tabel 5. 8 kemudian dicari persamaan $Y' = a + bX$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$X = 0$$

$$a = \frac{79,19}{4}$$

$$= 19,79$$

$$b = \frac{18,93}{20}$$

$$= 0,946$$

Setelah nilai a dan b diketahui kemudian dibuat persamaan

$$Y' = 19,79 + 0,946 (X)$$

Keterangan :

19,79 : jika periode waktu dari tahun dasarnya = 0 maka persentase proporsi realisasi PAD terhadap APBD sebesar 19,79%

0,946 : setiap penambahan setengah tahun (enam bulan) akan terjadi perubahan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD sebesar 0,946%

Dari persamaan tersebut dapat diketahui perkiraan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dari tahun perkiraan 2005 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005, } Y^? &= 19,79 + 0,946 (5) \\ &= 24,52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006, } Y^? &= 19,79 + 0,946 (7) \\ &= 26,41 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007, } Y^? &= 19,79 + 0,946 (9) \\ &= 28,30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Tahun 2008, } Y^? &= 19,79 + 0,946 (11) \\ &= 30,19 \end{aligned}$$

Uji signifikan Perkembangan Persentase Proporsi Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD

Untuk melihat apakah perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD signifikan atau tidak, maka dilakukan suatu pengujian dengan menggunakan rumus :

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan

b : perubahan nilai Y dari waktu ke waktu

S_b : kesalahan standar koefisien regresi b

Rumus perhitungan kesalahan standar estimasi (*standard error of estimate*) (Algifari, 2003: 175)

$$Se = \sqrt{\frac{\sum (Y - Y')^2}{(n - 2)}}$$

Rumus perhitungan kesalahan standar koefisien regresi b

(S_b) (Algifari, 2003: 177)

$$S_b = \frac{Se}{\sqrt{\sum (X^2) - \frac{(\sum X)^2}{n}}}$$

Kemudian melakukan perhitungan dengan tabel 5.9 sebagai berikut :

Tabel 5. 7
Perhitungan t-hitung

Tahun Anggaran	X	Y (%)	$(X - \bar{X})$	$(X - \bar{X})^2$	Y' (%)	(Y - Y') (%)	$(Y - Y')^2$
2001	-3	16,55	-3	9	16,39	0,16	0,02
2002	-1	18,60	-1	1	17,72	0,88	0,77
2003	1	16,86	1	1	19,05	-2,19	4,79
2004	3	21,57	3	9	20,38	1,19	1,41
Jumlah				$\sum (X - \bar{X})^2 = 20$		$\sum (Y - Y') = 0,04$	$\sum (Y - Y')^2 = 6,99$

Dari tabel 5. 8 kemudian dapat dihitung kesalahan standar estimasi (standard error of estimate) sebagai berikut :

$$Se = \sqrt{\frac{4,33}{4-2}}$$

$$Se = \sqrt{\frac{4,33}{2}}$$

$$Se = \sqrt{2,165}$$

$$Se = 1,47$$

Dari tabel 5. 9 kemudian dapat dihitung kesalahan standar koefisien regresi b sebagai berikut :

$$S_b = \frac{1,47}{\sqrt{20 - \frac{(0)^2}{4}}}$$

$$S_b = \frac{1,47}{\sqrt{20-0}}$$

$$S_b = \frac{1,47}{\sqrt{20}}$$

$$S_b = \frac{1,47}{4,47}$$

$$S_b = 0,328$$

kemudian dapat dihitung t-hitung sebagai berikut :

$$t = \frac{0,946}{0,328}$$

$$t = 2,88$$

C. Pembahasan

1. Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD

Hasil perbandingan proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD dapat dilihat dalam tabel 5. 10 sebagai berikut :

Tabel 5. 8
Perbandingan Realisasi PAD dengan Realisasi APBD
Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Proporsi PAD Terhadap APBD (%)
2001	40.352.592.890,43	243.769.299.493,98	16,55
2002	56.377.459.398,89	303.020.070.537,68	18,60
2003	68.621.564.311,07	406.856.436.542,81	22,47
2004	79.911.419.100,82	370.340.575.770,04	21,57

Dari tabel 5. 10 dapat diketahui proporsi realisasi PAD terhadap APBD selalu mengalami kenaikan.

- a. Pada tahun 2001 persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta sebesar 16,55%. Dengan melihat persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001 sebesar < 25%, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Pada tahun 2002 persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta sebesar 18,60%, Jika dilihat dari persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2001, persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002 mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,05%, walaupun persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002 ini mengalami kenaikan, namun proporsinya masih $< 25\%$, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

- c. Pada tahun 2003 persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Yogyakarta sebesar 22,47%, Jika dilihat dari persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2002, persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 3,87% dan proporsinya masih $< 25\%$, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- d. Pada tahun 2004 persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar 21,57%. Jika dilihat persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2003, persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,9%, namun proporsinya masih < 25%, maka Pendapatan Asli Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2. Perkembangan Persentase Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD

Hasil perhitungan analisis trend sebagai berikut :

$$Y' = 19,79 + 0,946 (X)$$

Dari persamaan diatas menggambarkan trendnya naik (dilihat dari lereng garis trend yang positif), berarti perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Dari persamaan tersebut, juga dapat diketahui perkiraan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel 5. 11 sebagai berikut :

Tabel 5. 9
Perkiraan Prosentase Proporsi Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD

Tahun	Perkiraan Prosentase Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD (%)
2005	24,52
2006	26,41
2007	28,30
2008	30,19

- a. perkiraan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2005 sebesar 24,52%
- b. perkiraan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2006 sebesar 26,41%
- c. perkiraan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2007 sebesar 28,30%
- d. perkiraan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD tahun 2008 sebesar 30,19%

Uji signifikan Perkembangan Persentase Proporsi Realisasi PAD terhadap Realisasi APBD

Langkah-langkah yang digunakan untuk uji signifikan sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis :

Ho : tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD yang signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004

Ha : ada perkembangan persentase proporsi realisasi PAD terhadap realisasi APBD yang signifikan di Kota Yogyakarta tahun 2001 sampai dengan tahun 2004

Digunakan pengujian dua sisi

- b. Menentukan taraf signifikansi (α)

Dalam penelitian ini digunakan α sebesar 5%, alasannya karena tingkat α tersebut merupakan acuan yang digunakan di bidang ekonomi, setelah itu mencari t-tabel yang memiliki derajat kebebasan (dk) = (n-2) maka didapat nilai $t_{0,025} = 3,18$

- c. Menghitung t-hitung :

$$t = \frac{0,946}{0,32}$$

$$= 2,88$$

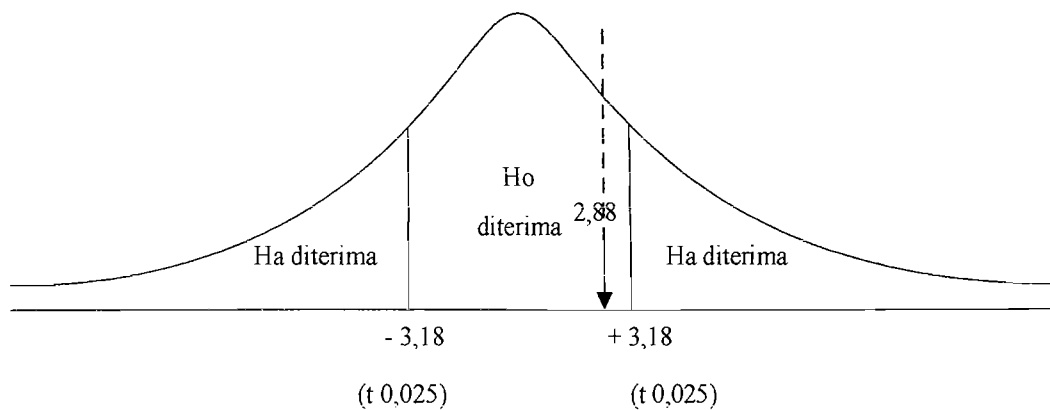
- d. Menentukan kriteria pengujian :

Ho diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

Ha diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$

- e. Menentukan daerah penerimaan Ho dan penerimaan Ha

Kurva 5.1



- f. Dari perhitungan hasil statistik uji perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan statistik uji (t-hitung) sebesar 2,88 yang memiliki nilai lebih kecil dari t tabel sebesar + 3,182, yang menunjukkan H_0 diterima, yang berarti tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 proporsi realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) proporsinya sebesar $< 25\%$, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan t- hitung sebesar 2,88 menunjukkan H_0 diterima, yang berarti tidak ada perkembangan persentase proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dengan nilai kemandirian sebesar 25 %, 50%, dan 75% sulit ditentukan ketepatannya untuk dilakukan kriteria penggolongan ke dalam kelompok kemampuan keuangan dan pola hubungan.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan saran dan masukan yang sekiranya bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Saran yang diberikan penulis adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan acuan lain dalam menentukan ukuran kemampuan keuangan daerah terutama yang berasal dari PAD untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta diharapkan sebaiknya dapat menarik para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk dapat menginvestasikan modalnya ke dalam bentuk usaha baik di bidang usaha produksi barang maupun di bidang jasa, karena Kota Yogyakarta memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan bentuk usaha di bidang produksi barang dan di bidang jasa dilihat dari terdapat banyaknya SDM yang cukup kompeten, sehingga dengan meningkatkan dan mengembangkan bentuk usaha baik di bidang produksi barang maupun di bidang jasa diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kota Yogyakarta untuk periode berikutnya sehingga diharapkan keberhasilan otonomi daerah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Djoefi. 1994. *Pokok-pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*. Jakarta : Cipta Rukun Sarana.
- Algifari. 2003. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Boedijoewono, Nugroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Boedijoewono, Nugroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 1993. *Statistik Induktif*. Edisi keempat . Yogyakarta. Penerbit BPFE.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit UPP AMP YKPN.
- Mallarangeng, Andi. 2000. *Demokrasi Otonomi Daerah*. Edisi pertama. Jakarta : Media Grafika.
- Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Edisi Baru. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahunan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- , 2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004. www.Depdagri.go.id.
- Parera, Fransiskus. 2004. *Analisis Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Dan Selama Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.
- Saragih, Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudjana, April. 2002. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito
- Vendayanti, Astherina. 2004. *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

-----, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. Jakarta : Sinar grafika.

-----, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. P3 Par Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Yuwono, Sony. *Penganggaran Sektor Publik*. 2005. Edisi pertama. Malang : bayumedia Publishing.

LAMPİRAN

Lampiran 1

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Y



Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,805	,707	1,47428

- a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,917	1	17,917	8,243	,103 ^a
	Residual	4,347	2	2,174		
	Total	22,264	3			

- a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,798	,737		26,857	,001
	X	,946	,330	,897	2,871	,103

- a. Dependent Variable: Y

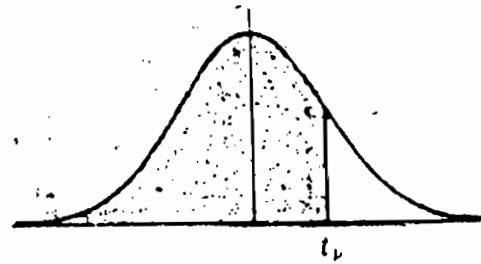
Lampiran 2

DAFTAR G

Nilai Persentil
Untuk Distribusi t

$v = dk$

(Bilangan Dalam Badan Daftar
Menyatakan t_p)



v	$t_{0.995}$	$t_{0.99}$	$t_{0.975}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.80}$	$t_{0.75}$	$t_{0.70}$	$t_{0.60}$	$t_{0.55}$
1	63.66	31.82	12.71	6.31	3.08	1.376	1.000	0.727	0.525	0.158
2	9.92	6.96	4.30	2.92	1.89	1.061	0.816	0.617	0.289	0.142
3	5.84	4.54	3.18	2.35	1.64	0.978	0.765	0.584	0.277	0.137
4	4.60	3.75	2.78	2.13	1.53	0.941	0.741	0.569	0.271	0.134
5	4.03	3.36	2.57	2.02	1.48	0.920	0.727	0.559	0.267	0.132
6	3.71	3.14	2.45	1.94	1.44	0.906	0.718	0.553	0.265	0.131
7	3.50	3.00	2.36	1.90	1.42	0.896	0.711	0.549	0.263	0.130
8	3.36	2.90	2.31	1.86	1.40	0.889	0.706	0.546	0.262	0.130
9	3.25	2.82	2.26	1.83	1.38	0.883	0.703	0.543	0.261	0.129
10	3.17	2.76	2.23	1.81	1.37	0.879	0.700	0.542	0.260	0.129
11	3.11	2.72	2.20	1.80	1.36	0.876	0.697	0.540	0.260	0.129
12	3.06	2.68	2.18	1.78	1.36	0.873	0.695	0.539	0.259	0.128
13	3.01	2.66	2.16	1.77	1.35	0.870	0.694	0.538	0.259	0.128
14	2.98	2.62	2.14	1.76	1.34	0.868	0.692	0.537	0.258	0.128
15	2.95	2.60	2.13	1.75	1.34	0.866	0.691	0.536	0.258	0.128
16	2.92	2.58	2.12	1.75	1.34	0.865	0.690	0.535	0.258	0.128
17	2.90	2.57	2.11	1.74	1.33	0.863	0.689	0.534	0.257	0.128
18	2.88	2.55	2.10	1.73	1.33	0.862	0.688	0.534	0.257	0.127
19	2.86	2.54	2.09	1.73	1.33	0.861	0.688	0.533	0.257	0.127
20	2.84	2.53	2.09	1.72	1.32	0.860	0.687	0.533	0.257	0.127
21	2.83	2.52	2.08	1.72	1.32	0.859	0.686	0.532	0.257	0.127
22	2.82	2.51	2.07	1.72	1.32	0.858	0.686	0.532	0.256	0.127
23	2.81	2.50	2.07	1.71	1.32	0.858	0.685	0.532	0.256	0.127
24	2.80	2.49	2.06	1.71	1.32	0.857	0.685	0.531	0.256	0.127
25	2.79	2.48	2.06	1.71	1.32	0.856	0.684	0.531	0.256	0.127
26	2.78	2.48	2.06	1.71	1.32	0.856	0.684	0.531	0.256	0.127
27	2.77	2.47	2.05	1.70	1.31	0.855	0.684	0.531	0.256	0.127
28	2.76	2.47	2.05	1.70	1.31	0.855	0.683	0.530	0.256	0.127
29	2.76	2.46	2.04	1.70	1.31	0.854	0.683	0.530	0.256	0.127
30	2.75	2.46	2.04	1.70	1.31	0.854	0.683	0.530	0.256	0.127
40	2.70	2.42	2.02	1.68	1.30	0.851	0.681	0.529	0.255	0.126
60	2.66	2.39	2.00	1.67	1.30	0.848	0.679	0.527	0.254	0.126
120	2.62	2.36	1.98	1.66	1.29	0.845	0.677	0.526	0.253	0.126
∞	2.58	2.33	1.96	1.645	1.28	0.842	0.674	0.524	0.253	0.126

Sumber : *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, Fisher, R.A. dan Yates, F.
Table III, Oliver & Boyd Ltd, Edinburgh

Lampiran 3

C - 1/A

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2001

NO.	URAIAN	JUMLAH		NO.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PENDAPATAN			II.	BELANJA		
1.	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	19.183.584.331,26	19.183.584.331,25	A.	RUTIN	185.335.774.000,00	175.950.709.677,39
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah Sendiri :	33.125.458.593,74	40.352.592.590,43	1.	Belanja Pegawai	140.821.096.109,00	142.335.453.916,90
a.	Pajak Daerah	17.814.447.519,50	22.886.374.632,50	2.	Belanja Barang	23.260.338.407,00	21.595.437.694,00
b.	Retribusi Daerah	11.503.842.081,00	11.773.895.343,16	3.	Belanja Pemeliharaan	5.861.979.439,00	5.641.956.729,00
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	2.249.570.045,51	2.249.570.025,31	4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.865.320.373,00	2.672.404.600,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.557.598.952,73	3.412.752.889,45	5.	Angsuran Hutang dan Bunga	2.374.053.178,00	2.312.394.074,49
3.	DANA PERIMBANGAN	153.014.249.000,00	167.269.506.353,29	6.	Pensiun dan Onderstand	0,00	0,00
a.	Bagi Hasil Pajak	17.872.784.000,00	32.634.378.513,29	7.	Bantuan Keuangan (Ganjaran)	662.900.510,00	662.900.510,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.220.000.000,00	493.655.406,00	8.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain	815.587.500,00	632.461.153,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	113.438.727.000,00	113.437.221.225,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersangka	9.674.496.484,00	107.651.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	20.482.738.000,00	20.714.251.109,00				
e.	Dana Darurat	0,00	0,00				

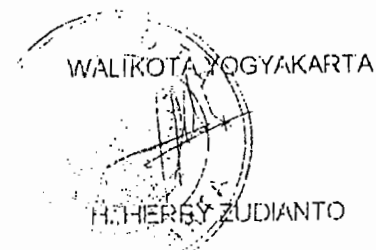
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah :	0,00	0,00	B.	PEMANGUNAN.	19.130.241.000,00	16.453.251.437,00
	a. Pos Pinjaman Dalam Negeri.	0,00	0,00	1.	Sektor Industri.	58.878.000,00	57.991.500,00
	b. Pos Pinjaman Luar Negeri.	0,00	0,00	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	421.650.000,00	399.252.350,00
5	Bagian lain-lain Penerimaan Yang Sah	143.723.070,00	203.486.495,00	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigas.	-	-
				4.	Sektor Tenaga Kerja.	109.300.000,00	103.057.750,00
				5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	2.463.234.495,00	2.429.030.615,00
				6.	Sektor Transportasi.	2.838.369.422,00	2.539.981.750,00
				7.	Sektor Pertambangan dan Energi.	-	-
				8.	Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.	198.656.000,00	167.843.300,00
				9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	1.836.050.000,00	1.707.438.930,00
				10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	368.500.000,00	350.257.750,00
				11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga.	1.852.133.638,00	1.769.259.980,00
				12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	242.700.000,00	242.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja..	1.569.792.500,00	1.371.672.750,00
				14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	2.004.670.901,00	703.732.049,00
				15.	Sektor Agama	157.200.000,00	157.200.000,00
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	161.500.000,00	156.930.350,00
				17.	Sektor Hukum.	231.015.000,00	213.252.750,00
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	4.391.367.794,00	3.819.637.363,00
				19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.	22.006.000,00	22.006.000,00
				20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	203.197.250,00	191.826.250,00
				21.	Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan :	205.467.015.000,00	227.009.170.069,93		Jumlah Belanja :	205.467.015.000,00	192.413.961.114,39
	Urusan Kas dan Perhitungan :	18.284.173.920,00	16.760.129.424,00		Urusan Kas dan Perhitungan :	18.284.173.920,00	15.758.971.859,00
					Sisa Perhitungan Tahun 2001		35.596.336.520,59
	Jumlah :	223.751.188.920,00	243.769.299.493,93		Jumlah :	223.751.188.920,00	243.769.299.493,98

***) CATATAN :**

- Sisa Perhitungan Tahun 2001 terdiri dari :

- 1) Sisa Perhitungan APBD Rp. 34.595.208.955,59
- 2) Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 1.001.157.565,00



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 2 Tahun 2003
 TANGGAL : 29 Maret 2003

C - I/A

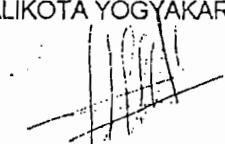
RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2003

NO.	PENDAPATAN	JUMLAH		NO.	BELANJA	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	34.595.208.955,59	35.593.366.520,59	1.	RUTIN	249.233.379.396,00	190.827.224.760,01
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.685.313.410,17	56.377.459.398,89	a.	Belanja Pegawai.	167.594.997.525,00	135.393.683.816,00
a.	Pajak Daerah.	27.107.396.233,00	30.517.591.845,50	b.	Belanja Barang.	30.236.812.172,00	27.899.625.010,00
b.	Retribusi Daerah.	13.991.791.110,00	14.193.457.159,11	c.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	3.431.703.772,00	8.147.911.909,00
c.	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.509.234.852,65	2.509.234.852,65	d.	Belanja Perjalanan Dinas.	2.389.148.210,00	2.110.625.725,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.076.891.214,52	9.157.175.541,63	e.	Belanja Lain-lain	14.055.456.539,00	12.977.997.388,25
3.	DANA PERIMBANGAN	185.333.797.889,24	187.968.763.862,24	f.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	2.228.011.389,00	2.223.800.069,76
a.	Bagi Hasil Pajak.	21.985.125.317,00	24.744.094.790,00	g.	Bagian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	808.672.572,24	350.156.572,24	h.	Pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian Lain.	1.652.065.503,00	1.577.798.332,00
c.	Dana Alokasi Umum (DAU).	162.540.000.000,00	162.874.512.500,00	i.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	22.695.179.276,00	495.782.450,00
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	0,00	0,00				
e.	Dana Darurat.	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
				2.	PEMBANGUNAN.	37.790.158.614,00	33.998.267.081,00
4.	PINJAMAN DAERAH.	0,00	0,00	1.	Sektor Industri.	80.000.000,00	75.054.750,00
a.	Pinjaman Dalam Negeri.	0,00	0,00	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	525.534.050,00	516.333.100,00
b.	Pinjaman Luar Negeri.	0,00	0,00	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	-	-
5	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	17.459.217.745,00	23.077.480.755,96	4.	Sektor Tenaga Kerja.	139.291.000,00	135.038.130,00
				5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi.	3.355.993.400,00	3.332.591.050,00
				6.	Sektor Transportasi.	2.795.937.150,00	2.600.701.210,00
				7.	Sektor Pertambangan dan Energi.	-	-
				8.	Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Daerah.	159.747.500,00	154.936.400,00
				9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	8.003.885.550,00	6.671.820.315,00
				10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	360.079.350,00	338.902.900,00
				11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah raga.	4.443.031.150,00	4.371.845.375,00
				12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	61.500.000,00	61.147.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	2.022.089.950,00	1.924.172.223,00
				14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	5.945.756.665,00	4.948.301.183,00
				15.	Sektor Agama.	149.000.000,00	148.200.000,00
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	628.500.000,00	558.949.860,00
				17.	Sektor Hukum.	196.000.000,00	190.076.800,00
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	8.250.826.349,00	7.322.535.810,00
				19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.	176.704.000,00	169.804.725,00
				20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	496.282.500,00	477.855.750,00
				21.	Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.	0,00	0,00
					Sisa Perhitungan TA. 2002 :		78.194.578.696,67
	Jumlah	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68		Jumlah	287.073.538.000,00	303.020.070.537,68
	Urusan Kas dan Perhitungan :	948.868.385,00	16.285.691.850,00		Urusan Kas dan Perhitungan :	948.868.385,00	16.285.691.850,00

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2004

TANGGAL : 29 MARET 2004

I

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 56.822.010.000,00	Rp 68.621.564.311,07	120,77
1. 1 1	Pajak Daerah	32.068.358.000,00	Rp 33.526.514.267,53	104,55
1. 1 2	Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	Rp 16.093.220.398,50	102,38
1. 1 3	Bagian Laba Usaha Daerah	2.509.235.000,00	Rp 4.081.649.388,86	162,67
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6.525.832.000,00	Rp 14.920.180.256,18	228,63
2	Dana Perimbangan	Rp 238.756.313.000,00	Rp 253.512.731.343,07	106,18
2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.458.673.000,00	Rp 32.300.731.328,00	126,88
2 2	Dana Alokasi Umum	196.100.000.000,00	Rp 196.100.000.000,00	100,00
2 3	Dana Alokasi Khusus	4.200.000.000,00	Rp 4.200.000.000,00	100,00
2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.997.640.000,00	Rp 20.912.000.015,07	160,89
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
3 1 02	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	7.841.710.000,00	Rp 16.496.466.000,00	210,37
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 303.420.033.000,00	Rp 338.630.761.654,14	111,60

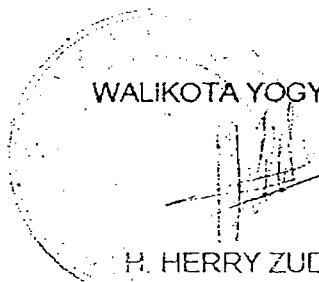
- 2 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	BELANJA			
2.1.	APARATUR DAERAH	Rp 62.807.668.122,00	Rp 52.950.512.131,94	84,31
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 26.581.823.882,00	Rp 19.447.043.068,94	73,16
2.1.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	22.382.820.474,00	Rp 16.125.537.328,00	72,04
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.738.243.168,00	Rp 2.241.175.420,94	81,85
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	786.598.000,00	Rp 507.729.950,00	64,55
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	674.162.240,00	Rp 572.600.370,00	84,94
2.1.2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 18.366.162.540,00	Rp 16.480.358.307,00	89,73
2.1.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	5.943.024.200,00	Rp 5.599.982.430,00	94,23
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.975.955.840,00	Rp 9.866.365.117,00	89,89
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.969.000,00	Rp 700.026.000,00	69,24
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	436.213.500,00	Rp 313.984.760,00	71,98
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 17.859.681.700,00	Rp 17.023.110.756,00	95,32
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 284.849.295.261,00	Rp 252.400.520.295,50	88,61
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 186.898.710.462,00	Rp 166.942.266.025,00	89,32
2.2.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	163.724.462.089,00	Rp 145.745.589.574,00	89,02
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.497.152.559,00	Rp 15.028.467.895,00	91,10
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.490.959.030,00	Rp 1.406.948.597,00	94,37
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	5.186.136.784,00	Rp 4.761.259.959,00	91,81
2.2.2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 28.550.000.880,00	Rp 26.813.257.737,50	93,92
2.2.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	5.660.534.637,00	Rp 5.207.682.216,50	92,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.877.536.355,00	Rp 12.928.295.375,00	93,16
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.103.000,00	Rp 1.297.025.030,00	90,06
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	7.571.826.888,00	Rp 7.380.255.116,00	97,47
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 46.128.974.703,00	Rp 41.117.455.909,00	89,14
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 17.671.609.216,00	Rp 17.172.995.474,00	97,18
2.4.	Belanja Tidak Tersangka	Rp 5.600.000.000,00	Rp 354.545.150,00	6,33
	JUMLAH BELANJA:	Rp 347.656.963.383,00	Rp 305.351.032.427,44	87,83
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp (44.236.930.383,00)	Rp 33.279.729.226,70	(75,23)

- 3 -

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan Daerah			
1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2002	Rp 57.869.791.627,00	Rp 57.456.145.471,67	99,29
1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp	Rp	
1 3 -	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp	Rp	
1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp	Rp	
1 5 -	Hibah	Rp 10.769.529.417,00	Rp 10.769.529.417,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 68.639.321.044,00	Rp 68.225.674.888,67	99,40
2	Pengeluaran Daerah			
2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp 5.530.465.622,00	Rp 5.530.465.622,00	100,00
2 2	Penyertaan Modal	Rp 17.839.529.417,00	Rp 17.836.550.642,20	99,98
2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 1.032.395.622,00	Rp 1.000.431.870,30	96,90
2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2003	Rp	Rp 77.137.955.980,87	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 24.402.390.661,00	Rp 101.505.404.115,37	415,96
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp 44.236.930.383,00	Rp (33.279.729.226,70)	(75,23)

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 JUNI 2005

I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

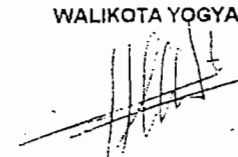
NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 70.412.081.000,00	Rp 79.911.419.160,62	113,49
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 38.149.900.000,00	Rp 40.581.980.256,00	106,38
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 18.269.452.000,00	Rp 18.995.046.383,00	103,97
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 5.188.903.000,00	Rp 5.285.786.650,47	101,87
1. 1 4	Lain-lain: Pendapatan Asli Daerah	Rp 8.803.826.000,00	Rp 15.048.605.811,35	170,93
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 252.390.201.000,00	Rp 269.967.630.200,69	106,96
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 29.583.201.000,00	Rp 37.889.440.614,00	128,08
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 197.787.000.000,00	Rp 197.787.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 5.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 19.520.000.000,00	Rp 28.791.189.586,69	147,50
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 18.342.100.000,00	Rp 19.770.829.733,00	107,79
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp 5.043.100.000,00	Rp 6.471.829.733,00	128,33
1. 3 1 03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 13.299.000.000,00	Rp 13.299.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 341.144.382.000,00	Rp 369.649.879.034,51	108,36

- 2 -

KODOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	BELANJA			
2.1	APARATUR DAERAH	Rp 65.747.492.220,00	Rp 58.351.605.850,29	88,75
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 32.042.599.235,00	Rp 29.673.749.913,23	91,36
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.674.269.430,00	Rp 24.609.311.873,45	91,59
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.505.142.655,00	Rp 3.119.007.059,84	89,01
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 977.261.000,00	Rp 945.718.210,00	96,26
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 139.730.410,00	Rp 128.752.250,00	87,53
2.1.2	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 21.210.632.125,00	Rp 19.633.614.620,09	87,85
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 5.237.638.130,00	Rp 5.015.865.100,00	93,10
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.825.627.025,00	Rp 11.909.399.800,00	88,18
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.365.369.900,00	Rp 2.328.024.500,00	77,28
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 632.002.050,00	Rp 460.325.130,00	76,00
2.1.3	Belanja Modal	Rp 12.494.350.800,00	Rp 10.444.241.517,00	83,59
2	BELAYANAN PUBLIK	Rp 349.459.699.027,00	Rp 311.923.969.919,75	89,20
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 210.531.212.085,00	Rp 188.939.446.036,75	89,74
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 186.318.616.267,00	Rp 168.213.395.138,75	90,29
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.421.704.051,00	Rp 14.288.135.058,00	82,01
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.113.475.400,00	Rp 1.955.133.492,00	93,90
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 4.677.335.760,00	Rp 4.447.727.398,00	95,09
2.2.2	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 38.887.655.965,00	Rp 35.617.724.575,00	94,61
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.971.966.625,00	Rp 6.679.305.413,00	95,21
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 21.173.814.125,00	Rp 20.039.410.552,00	94,74
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 3.265.302.900,00	Rp 3.043.573.100,00	93,21
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 7.476.572.315,00	Rp 7.005.405.190,00	94,33
2.2.3	Belanja Modal	Rp 56.004.154.896,00	Rp 50.269.235.372,00	89,74
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 32.036.676.151,00	Rp 30.574.732.481,00	96,69
2.4	Belanja Tidak Tersangka	Rp 12.000.000.000,00	Rp 4.996.667.725,00	41,64
	JUMLAH BELANJA:	Rp 415.297.191.317,00	Rp 370.240.575.773,04	89,19
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp (74.052.893.317,00)	Rp (490.696.735,53)	0,93

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Daerah			
3 1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 77.898.420.898,00	Rp 77.137.955.980,87	99,02
3 1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 18.500.000.000,00	Rp 18.500.000.000,00	100,00
3 1 3 -	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
3 1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5 -	Hibah	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 96.398.420.898,00	Rp 95.637.955.980,87	99,21
3 2	Pengeluaran Daerah			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp 11.267.142.598,00	Rp 11.267.142.598,00	100,00
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 8.500.000.000,00	Rp 8.489.379.793,83	99,88
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 2.568.468.983,00	Rp 2.568.468.483,00	100,00
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2004	Rp -	Rp 72.622.268.370,51	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 22.335.611.581,00	Rp 94.947.259.245,34	425,09
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp 74.062.809.317,00	Rp 690.696.735,53	Rp 0,93

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Lampiran 4



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 BADAN PERENCANAAN DAERAH
 (B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
 Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
 Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
 E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2649

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk No : 31/Kaprodi Akt/106/IV/2006
 Tanggal : 2 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
 Departemen Dalam Negeri.
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang
 Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **FRAN MARINKA WIDIANTO** No. Mhs./NIM : 992114207
 Alamat Instansi : Mrican, Yogyakarta
 Judul : ANALISIS PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SELAMA OTONOMI DAERAH (Studi
 Kasus Pada Kota Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 11 Mei 2006 s/d 11 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 (Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk;
5. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 11 Mei 2006

A.n. GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
 BAPEDA



I. NANG SUWANDI
 NIP. 490 022 448

